

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Narbuko, Cholid, dan Abu Ahmad. 2002. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Angkasa.
- Irawan, Dimas Dwi. 2013. *Pengemis Undercover Rahasia Seputar Kehidupan Pengemis*. Jakarta: Titik Media Publisher.
- Prakoso, Djoko. 1985, *Proses Pembuatan Peraturan Daerah*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soejito, Irawan. 1989. *Teknik Membuat Peraturan Daerah*. Jakarta: Bina Aksara.
- Kartono, Kartini. 2003. *Patologi Sosial II Kenakalan Remaja*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kurnia, Mahendra Putra, dkk. *Pedoman Naskah Akademik Perda Partisipatif*. Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- Indrati, Maria Farida. 2007. *Ilmu Perundang-Undangan Dasar dan Pembentukannya*. Yogyakarta: Kansius.
- Huda, Ni'matul. 2009. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Nusa Media.
- Wasistiono, Sadu, dkk. 2006. *Memahami Asas Tugas Pembantuan*, Bandung: Fokusmedia.
- Sinanga, Budiman N.P.D. 2005, *Ilmu Perundang-Undangan*. Yogyakarta: UII Pres.
- Steers, Richard M. 1985. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tjauan Singkat*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Steers, Richard M. 1985. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Subagyo, P. Joko. 2011. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Renika Cipta.

De Guzman, Raul P, and Mila A. Reforma. 1993. *Decentralization Towards Democracy And Development*. Manila: Eropa Secretariat.

Koesoemahatmadja, R.D.H. 2006. *Pengantar ke Arah Sistem Pemerintah Daerah Di Indonesia*. Bandung: Binacipta.

Twikromo, Y. Argo. 1999. *Gelandangan Yogyakarta: Suatu kehidupan dalam bingkai tatanan Sosial-Budaya "Resmi"*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Hasyimzoe, Yusnani, *et al.* 2017. *Hukum Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Jurnal

Chairika, N., & Husni Thamrin. Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Terhadap Gelandangan dan Pengemis Di Kota Medan, *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Vol. 4 No. 2, (2016).

Cindy, A.P., Lita, T.ALW., & Ratna, H. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5 No. 2, (2016).

Lisa, Y.K.A. Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Kota Samarinda Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Penertiban dan Penanggulangan Gelandangan Pengemis di Kota Samarinda", *eJournal Administrasi Negara*, Vol. 1 No. 4, (2013).

Mhd,Yusrizal, A.S. Kajian Hukum Pemberlakuan Perda Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 Perspektif Utilities Theory, *Mercatoria*, Vol. 10 No. 2, (2017).

Muaz, Z. Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Medan Pada Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Sumatera Utara, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 2 No. 1, (2014).

Mutiaratih, L.J., & Johannes, Sutoyo. Hasil dan Dampak Upaya Koersif dalam Penegakan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 13 No. 1, (2017).

Sri, Kuntari., & Eny, Hikmawati. Melacak Akar Permasalahan Gelandangan Pengemis (Gepeng), *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Vol. 41 No. 1, (2017).

Suljalali, W. (2017). Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda Dalam Penertiban Pengemis di Pasar Pagi Kecamatan Samarinda Ilir”, *eJournal Administrasi Negara*, Vol. 5 No. 1, (2017).

Syaputra. M.Y.A. Kajian Hukum Pemberlakuan Perda Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 Perspektif Utilities Theory, *Mercatoria*, Vol. 10 No. 2, (2017).

Tyas, M.A., & Noviyanti, K.D. (2016). Identifikasi Permasalahan Gelandangan dan Pengemis di Upt Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis, *INQUIRY Jurnal Ilmiah Psikologi*, Vol. 7 No. 1, (2016).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (sebelum dan sampai dengan amandemen ke IV).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan pengemis.

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Sosial.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Gelandangan dan Pengemis.

Peraturan Bupati Sleman Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial.

Peraturan Bupati Sleman Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

Internet

Kementerian Sosial Republik Indonesia, <http://www.kemsos.go.id/page/psbk-pangudi-luhur>, diakses pada tanggal 17 Januari 2019 pada jam 08.00 WIB.

Brain Harefa, “GELANDANGAN DAN PENGEMIS (Makalah Gepeng)”, http://www.academia.edu/6492300/MAKALAH_GEPENG, diakses pada tanggal 30 Januari 2019 pada jam 21.30 WIB.

<https://bulelengkap.kb.go.id/detail/artikel/gelandangan-dan-pengemis-gepeng-14>, diakses pada tanggal 30 Januari 2019 pada jam 22.00 WIB.

Profil Daerah, http://www.slemankab.go.id/profil-kabupaten_sleman/geografi/letak-dan-luas-wilayah, diakses pada tanggal 19 Januari 2019 pada jam 13.30 WIB.

Camp Assesment Dinsos DIY 2017, <http://dinsos.jogjaprovo.go.id/?p=2418>, diakses pada tanggal 28 Januari 2018 pada pukul 10.00 WIB.

Sarana dan Prasarana di Unit Bina Karya, <http://brsbkl.jogjaprovo.go.id/p/sarana-dan-prasarana-di-unit-bina-karya.html>, di akses pada tanggal 15 Februari 2019 pukul 13.15 WIB.